



MENGUPAS TUNTAS PERAN HUKUM DALAM MENCEGAH PRAKTIK BISNIS TIDAK ETIS DI PERUSAHAAN

Putri Damayanti

Universitas Negeri Semarang

Anis Monica Sari

Universitas Negeri Semarang

Rizqa Ayu Ambarwati

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: damayantip719@students.unnes.ac.id

Abstract. *Unethical business practices, such as corruption, fraud, and labor exploitation, are increasingly becoming a concern in the global business world, including in Indonesia. The role of law in preventing and addressing these practices is crucial in maintaining corporate integrity and consumer trust. This article examines the role of law in preventing unethical business practices within companies, as well as the impacts resulting from such violations. The research employs a normative juridical method with a literature approach and secondary data, involving various laws related to business and ethics. The study aims to identify existing regulations and policies, as well as to evaluate the effectiveness of legal implementation in shaping an ethical business environment. The results show that legal violations in business practices negatively impact a company's reputation and erode consumer trust. Additionally, this research provides policy recommendations that can help companies mitigate the risk of legal violations and foster more responsible and ethical business practices.*

Keywords: *corporate law, business ethics, legal role, corporate reputation*

Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi sebagian guru PAI kurangnya dalam melaksanakan pembelajaran kurikulum 2013 dan masih ada kendala dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Guru hanya menggunakan ceramah dan diskusi yang siswa hanya sebagai pendengar, bahkan dalam pelaksanaan kurikulum 2013 ini pola pembelajaran yang biasanya berpusat pada guru harus diubah menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pendekatan ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, artinya peneliti akan melihat fenomena yang terjadi di sekolah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk penelitian deksriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kurikulum 2013 di SMP N 2 Padang Panjang yaitu : guru melaksanakan pembelajaran dengan berdiskusi dan ceramah, dan kendala dalam pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 khususnya pada mata pelajaran PAI yaitu kurang tersedianya buku bahan ajar, kurangnya jam pelajaran PAI dan kurangnya sarana prasarana pembelajaran PAI.

Kata kunci: Implementasi Kurikulum 2013, Pembelajaran PAI

LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi yang semakin pesat, praktik bisnis yang tidak etis menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh perusahaan di seluruh dunia. Praktik-praktik tersebut mencakup korupsi, penipuan, diskriminasi, dan eksploitasi tenaga kerja, yang dapat merusak reputasi perusahaan, menurunkan kepercayaan publik, dan mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, peran hukum menjadi sangat krusial dalam mencegah dan menanggulangi praktik bisnis yang tidak etis ini khususnya di negara Indonesia.

Bisnis merupakan kegiatan terpadu yang meliputi perdagangan dan pertukaran barang, jasa, atau uang yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan maksud memperoleh manfaat serta keuntungan. Istilah bisnis berhubungan erat dengan aktivitas komersial yang terjadi di dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, bisnis merupakan proses sosial. Proses sosial ini dapat dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok dengan melakukan penciptaan dan pertukaran komoditas atau jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan untuk memperoleh manfaat atau profit.¹

Etika bisnis didalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, Untuk menjalankan bisnis dengan sukses, kepercayaan harus dibangun di antara semua pihak yang terlibat dalam transaksi, dan kepercayaan ini harus didasarkan pada lebih dari sekadar kontrak dan undang-undang formal. Oleh karena itu, tidak ada rasa saling percaya tanpa etika. Karena tidak ada saling percaya dan waktu transaksi yang lama, risiko bisnis sangat meningkat. Ketika etika sangat penting dalam dunia bisnis, masalah etika akan berdampak besar pada hubungan bisnis dengan pemilik kepentingan.

Suatu perusahaan akan berhasil bukan hanya berlandaskan moral dan manajemen yang baik saja, tetapi juga harus memiliki etika bisnis yang baik. Perusahaan harus dapat mempertahankan mutu serta dapat memenuhi permintaan pasar yang sesuai dengan apa yang dianggap baik dan diterima masyarakat. Perilaku tidak etis dalam kegiatan bisnis sering juga terjadi karena peluang-peluang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan dan disalah gunakan dalam penerapannya dan kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar etika bisnis. Perlu dipahami, karyawan yang berkualitas adalah aset yang paling berharga bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus semaksimal mungkin harus mempertahankan karyawannya.² Namun, dalam kenyataannya, tidak semua perusahaan mampu mengimplementasikan etika bisnis secara konsisten dalam aktivitas bisnisnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan sulit menerapkan etika bisnis secara konsisten, seperti tekanan dari persaingan bisnis, keuntungan yang lebih diutamakan daripada nilai moral, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya etika bisnis. Etika bisnis sering dilanggar, dan kebanyakan orang bahkan tidak menyadarinya. Dalam menjalankan bisnis di Indonesia, kita tidak melihat banyak pelanggaran etika bisnis yang tidak disengaja. Di Indonesia, ada banyak contoh praktik komersial yang tidak etis yang dapat ditelusuri kembali ke bisnis yang sembrono. Bisnis yang ingin mendominasi pasar terlibat dalam persaingan tidak sehat dengan menggunakan taktik yang beragam ini.³ Selain menguasai pasar, ada motivasi tambahan yang memotivasi para pelaku bisnis untuk melanggar etika bisnis, seperti memperluas pasar dan meraup imbalan finansial yang besar. Biasanya para pebisnis melanggar aturan dengan berbagai cara.

¹Mustika, A., Mindari, E., Kartawinata, B. R., Rachmawati, M., Mahriani, E., Nugraheni, K. S., ... & Solihat, W. (2020). Pengantar Bisnis.

²Hasoloan, A. (2018). Peranan etika bisnis dalam perusahaan bisnis. *Warta Dharmawangsa*, (57).

³Alkahfi, M. A., & Nawawi, Z. M. (2022). Peran Etika Bisnis dalam Perusahaan Bisnis di Era Globalisasi. *ManBiz: Journal of Management and Business*, 1(2), 75-88.

KAJIAN TEORITIS

Salah satu penyebab utama tingginya praktik bisnis tidak etis di Indonesia adalah peran hukum yang lemah dan kesadaran hukum yang masih rendah di kalangan pelaku bisnis. Meskipun ada berbagai peraturan yang telah ditetapkan untuk mengatur praktik bisnis, implementasinya sering kali tidak konsisten. Banyak perusahaan yang merasa bahwa mereka dapat mengabaikan hukum tanpa konsekuensi yang serius, karena rendahnya tingkat penegakan hukum dan sanksi yang tidak tegas. Selain itu, banyak pelaku bisnis yang tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hukum dan etika bisnis, sehingga mereka tidak menyadari bahwa tindakan mereka dapat melanggar norma-norma yang ada. Akibatnya, praktik bisnis yang tidak etis terus berkembang, menambah tantangan bagi upaya menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Berikut rumusan masalah dari artikel berikut:

1. Apa dampak dari pelanggaran hukum akibat praktik bisnis tidak etis di perusahaan terhadap reputasi dan kepercayaan konsumen?
2. Bagaimana perusahaan dapat memitigasi risiko pelanggaran Hukum terhadap reputasi perusahaan melalui kebijakan hukum yang tepat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dalam artikel ilmiah ini menggunakan Metode penelitian Hukum dengan penelitian yuridis normatif, dengan bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti beberapa sumber kepustakaan atau data sekunder. Bahan hukum penelitian yuridis normatif yakni peraturan perundang-undangan, Kemudian didukung dengan menggunakan data sekunder dengan bahan Hukum primer berupa ebook, jurnal, artikel dari para ahli hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak dari Pelanggaran Hukum Akibat Praktik Bisnis Tidak Etis di Perusahaan terhadap Reputasi dan Kepercayaan Konsumen

Etika bisnis perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, dimana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua. Menurut Richard De George, bila perusahaan ingin sukses/berhasil memerlukan 3 hal pokok yaitu :

1. Memiliki produk yang baik.
2. Memiliki manajemen yang baik.
3. Memiliki Etika.⁴

⁴Arief, H. M. (2019). Business Ethic And Good Governance (Be & Gg) Etika Bisnis Pada Pt Sucaco Tbk. Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 1(2), 153-161.

Pelanggaran etika bisa terjadi di mana saja, termasuk dalam dunia bisnis. Untuk meraih keuntungan, yang sebagaimana terdapat dalam Pasal 22 UU No.5 tahun 1999 yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Pasal ini menjelaskan tentang Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa. Dan unsur dari bersekongkol itu sendiri adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan, tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu, pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.⁵ Hal diatas adalah pelanggaran yang akan diterima kepada perusahaan yang tidak menerapkan etika didalam bisnisnya karena memiliki unsur kecurangan.

Adanya tindakan tidak etis dalam suatu perusahaan makada dapat diatasi dengan perusahaan harus memperhatikan aturan hukum yang ada. Implikasi hukum bisnis terhadap praktik etika bisnis merupakan aspek penting yang perlu dipahami dalam konteks kegiatan bisnis di Indonesia. Hukum bisnis, sebagai kerangka hukum yang mengatur kegiatan bisnis, memiliki peran yang signifikan dalam membentuk praktik bisnis yang etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar moral yang diterima dalam masyarakat. Implikasi ini mencakup dampak positif atau negatif yang timbul akibat penerapan atau pelanggaran hukum bisnis terhadap praktik etika bisnis di Indonesia.

1. Regulasi Hukum Bisnis di Indonesia

- a. Undang-Undang (UU) tentang Persaingan Usaha yang mengatur praktik bisnis yang tidak sehat seperti monopoli, kolusi, dan praktik yang merugikan konsumen.
- b. UU Perlindungan Konsumen yang melindungi hak-hak konsumen dan mendorong praktik bisnis yang jujur dan transparan.
- c. UU tentang Penanaman Modal yang mengatur investasi dan bisnis asing di Indonesia, termasuk aspek etika dalam pengelolaan lingkungan dan tenaga kerja.
- d. UU tentang Ketenagakerjaan yang melindungi hak-hak pekerja dan mendorong praktik kerja yang adil dan manusiawi.

2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

- a. Hukum Bisnis memberikan kerangka hukum untuk tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia, seperti kewajiban perusahaan dalam mendukung

⁵Rajagukguk, E. (2012). Perluasan Tafsir Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Jurnal Yudisial, 5(1), 51-63.

pembangunan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

- b. Implementasi CSR yang baik dapat mempengaruhi praktik etika bisnis, meningkatkan reputasi perusahaan, dan membangun hubungan yang baik dengan stakeholder.

3. Perlindungan Kekayaan Intelektual

- a. Hukum Bisnis melindungi hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, merek dagang, dan paten, yang berkontribusi pada praktik bisnis yang inovatif dan etis.
- b. Perlindungan kekayaan intelektual mendorong perusahaan untuk melindungi karya kreatif mereka, mencegah pelanggaran hak cipta, dan mendorong inovasi yang bertanggung jawab.

4. Penyelesaian Sengketa Bisnis

- a. Sistem hukum bisnis yang efektif dan adil memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa bisnis dengan cara yang etis dan profesional.
- b. Penyelesaian sengketa yang efisien dan transparan dapat mencegah praktik bisnis yang tidak etis dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Implikasi hukum bisnis terhadap praktik etika bisnis di Indonesia sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan.⁶

Pelanggaran Hukum akibat Praktik bisnis yang tidak etis memiliki banyak sekali dampak yang ditimbulkan, baik dampak secara hukum, dampak bagi perusahaan, dan konsumen berikut dampak yang dapat diterima perusahaan ketika melakukan pelanggaran etika bisnis:

1. Sanksi Administratif

- a. Denda dan Sanksi Finansial: Perusahaan yang melanggar hukum dapat dikenakan denda yang signifikan. Jumlah denda ini sering kali ditentukan oleh tingkat pelanggaran dan dapat bervariasi berdasarkan peraturan yang berlaku.
- b. Pencabutan Lisensi atau Izin Usaha: Pelanggaran yang serius dapat mengakibatkan pencabutan izin usaha atau lisensi, yang berarti perusahaan tidak dapat beroperasi secara legal.

2. Tanggung Jawab Pidana

- a. Dapat Dikenai Tuntutan Pidana: Dalam kasus pelanggaran hukum yang serius, individu yang terlibat (seperti manajemen perusahaan) dapat dikenakan tuntutan pidana, yang dapat mengarah pada hukuman penjara atau denda pribadi.

⁶Suryadi, N., Basuki, A., & Moko, W. (2021). Etika Bisnis. Universitas Brawijaya Press.

- b. Menyebabkan Reputasi Buruk bagi Pimpinan: Tindakan hukum dapat menciptakan stigma bagi individu yang terlibat, yang dapat mempengaruhi karir mereka di masa depan.

3. Dikenakan Tindakan Hukum Perdata

- a. Dapat menerima ugatan dari Pihak Ketiga: Konsumen, mitra bisnis, atau pemangku kepentingan lainnya dapat mengajukan gugatan terhadap perusahaan sebagai akibat dari praktik tidak etis yang merugikan mereka.
- b. Membayar Kompensasi Kerugian pada konsumen: Jika perusahaan kalah dalam gugatan, mereka dapat diperintahkan untuk membayar kompensasi kepada pihak yang dirugikan, yang dapat berjumlah besar.

4. Rusaknya Reputasi Perusahaan

Ketika perusahaan terlibat dalam praktik bisnis yang tidak etis, reputasi mereka dapat rusak secara cepat. Berita negatif mengenai pelanggaran hukum dapat menyebar luas melalui media dan platform sosial, mengakibatkan citra perusahaan menjadi buruk di mata publik.⁷

5. Penurunan Kepercayaan Konsumen

Konsumen cenderung menghindari perusahaan yang terlibat dalam praktik tidak etis. Penurunan kepercayaan ini dapat mengakibatkan kehilangan pelanggan yang setia, yang sebelumnya mempercayai produk atau layanan perusahaan. Dan menjadi masalah yang berdampak pada penjualan dan pendapatan perusahaan. Konsumen yang kehilangan kepercayaan cenderung tidak akan bertransaksi dengan perusahaan tersebut, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi laba dan pertumbuhan perusahaan.

6. Kesulitan Rekrutmen dan Retensi Karyawan

Perusahaan dengan reputasi buruk juga dapat mengalami kesulitan dalam menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Karyawan yang merasa bangga bekerja untuk perusahaan dengan etika yang baik mungkin akan enggan bergabung dengan perusahaan yang memiliki masalah reputasi.

Dengan demikian, praktik bisnis yang tidak etis dan pelanggaran hukum bukan hanya berdampak pada aspek hukum dan finansial perusahaan, tetapi juga secara mendalam mempengaruhi reputasi dan kepercayaan konsumen. Dalam dunia yang semakin terhubung dan transparan, konsumen lebih cerdas dan kritis dalam memilih produk dan layanan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjaga integritas dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam setiap aspek operasionalnya. Hal ini tidak hanya penting untuk mempertahankan reputasi, tetapi juga untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan konsumen. Memastikan praktik bisnis yang etis dan mematuhi hukum akan memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan serta menciptakan fondasi yang kuat bagi keberlanjutan perusahaan di masa depan.

⁷Tanudjaja, B. B. (2006). Perkembangan corporate social responsibility di Indonesia. *Jurnal Desain Komunikasi Visual Nirmana*, 8(2), 92-98

Peran Perusahaan dalam Memitigasi Risiko Pelanggaran Hukum terhadap Reputasi Perusahaan Melalui Kebijakan Hukum yang Tepat

Hukum Perusahaan, khususnya hukum kontrak, mempunyai dampak yang besar terhadap etika perusahaan dalam praktik perusahaan di Indonesia. Didasarkan pada teori dan sudut pandang, kepatuhan hukum, menjaga kepentingan semua pihak, kreativitas, dan akuntabilitas. Dampak permasalahan sosial perusahaan terhadap etika dan praktik bisnis sangatlah signifikan dan akuntabel. Memahami konsekuensi hukum perusahaan di Indonesia memungkinkan pengusaha untuk melakukan hal tersebut meningkatkan perilaku moral perusahaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi adil dan tahan lama. Kumpulan aturan dan pedoman yang mengatur transaksi komersial dan interaksi antara bisnis, individu, dan pemerintah dikenal sebagai hukum bisnis. Karena bisnis dijalankan melalui hukum, hukum bisnis memainkan peran penting dalam aktivitas komersial bisnis, yang mempunyai kemampuan untuk menjaga kepentingan dan mengendalikan hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi komersial, selain menawarkan landasan hukum yang adil dan dapat dipercaya bagi mereka. Pentingnya Hukum Bisnis dalam Praktik Bisnis :

1. Memberikan kerangka hukum yang jelas: Bagi pelaku bisnis dalam menjalankan operasionalnya, hukum bisnis menawarkan kerangka hukum yang jelas dan terorganisir. Ketika undang-undang bisnis jelas, pengusaha dapat memahami hak dan hak mereka tanggung jawab mereka, serta batasan dan ketentuan yang harus dipenuhi di masing-masingnya pertukaran komersial.
2. Melindungi kepentingan semua pihak: Semua pihak yang terlibat dalam bisnis, termasuk korporasi, pemegang saham, karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat luas, kepentingannya dilindungi oleh hukum bisnis. Hukum bisnis menjamin hal itu, Masing-masing pihak diberikan perlakuan yang sama dan dilindungi undang-undang.
3. Menjaga integritas dan kredibilitas bisnis: reputasi dan integritas perusahaan juga dilindungi oleh undang-undang perusahaan. Karena ada undang-undang yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan, kejujuran, dan keterbukaan, praktik bisnis yang etis dan akuntabilitas dapat ditegakkan. Ini membantu menciptakan gambar yang bermanfaat bagi bisnis dan memenangkan kepercayaan pemangku kepentingan.
4. Mengatasi pelanggaran dan sengketa bisnis: Hukum bisnis juga dapat digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran dan potensi konflik. Seiring dengan pedoman hukum yang jelas, para pelaku bisnis dapat menyelesaikan perselisihan dengan cara yang demikian adil dan menghindari perselisihan yang berdampak buruk bagi semua orang yang terlibat.
5. Mendorong inovasi dan pertumbuhan bisnis: Suasana yang mendukung perkembangan perusahaan akan didorong oleh hukum bisnis yang mendorong inovasi dan ekspansi perusahaan. Dengan hak milik yang dilindungi secara hukum

insentif hukum, perlindungan investasi, dan kekayaan intelektual Para pebisnis akan terinspirasi untuk berkreasi dan berinovasi di perusahaan mereka.⁸

Mitigasi Risiko merupakan tindakan yang bertujuan untuk menurunkan, menstabilkan, dan/atau meningkatkan risiko utama hingga mendekati risiko sisa yang diantisipasi. Kegiatan yang terencana dan berkesinambungan yang dilakukan oleh pemilik risiko untuk mengurangi dampak suatu kejadian yang berpotensi merugikan atau mengancam dirinya disebut dengan mitigasi risiko.

Besaran risiko terendah yang dapat dicapai dengan menurunkan besaran risiko primer dikenal sebagai risiko sisa yang diharapkan. mitigasi faktor risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya. Sangat penting untuk mengintegrasikan manajemen risiko secara tepat dalam perusahaan untuk mengambil tindakan guna membatasi potensi dampak dengan mengatur bagian internal organisasi. penerapan manajemen risiko, dimana peran yang dimaksud sangat penting dalam mengurangi risiko-risiko yang sudah ada, khususnya risiko- risiko yang dikenal dengan istilah Upside Risk dan Downside Risk, yang masing- masing memiliki dampak berbeda dalam mencapai Organizational Goals (SO) dan SO secara negatif. Pembeneran ini mengarah pada kesimpulan bahwa manajemen risiko dapat dimanfaatkan untuk mengurangi dampak buruk dari prosedur perusahaan saat ini. Pentingnya manajemen Risiko:

- a. Jika tidak ditangani secara efektif sejak awal, bahayanya dapat berkembang menjadi “virus mematikan” yang pada akhirnya dapat melumpuhkan organ- organ lain dalam bisnis tersebut.
- b. Untuk menjamin hasil terbaik bagi setiap tujuan perusahaan, manajemen risiko adalah alat yang harus dimiliki dan terus dikembangkan oleh bisnis.
- c. Manajemen risiko tidak hanya mencakup “menghilangkan” apa pun yang mungkin salah, namun juga berkaitan erat dengan memaksimalkan nilai- nilai positif organisasi.
- d. Sangat penting untuk menciptakan teladan manajemen risiko yang kuat yang melampaui tingkat eksekutif dan teknis serta mendukung Kementerian Keuangan khususnya DJKN dalam upayanya untuk menjadi contoh manajemen risiko bagi organisasi lain.⁹

Perusahaan dapat Memitigasi Risiko pelanggaran hukum terhadap reputasi melalui kebijakan hukum yang tepat dengan mengikuti beberapa langkah strategis. Berikut adalah cara-cara yang dapat diambil:

1. Manajemen Risiko Hukum dan Kepatuhan

Kepatuhan dan manajemen risiko hukum merupakan elemen penting dalam mengendalikan risiko yang terkait dengan pelanggaran hukum apa pun. Dunia usaha harus memastikan bahwa semua anggota stafnya mengetahui undang-

⁸Rustandi & RR Amanna Dzirkillah Lazuardini LAH, “Implikasi Hukum Bisnis Terhadap Praktik Etika Bisnis Di Indonesia”, Jurnal Bisnis & Kewirausahaan, Vol. 19 No. 2 (2023) hal. 62.

⁹Ridho Kurniawan Siregar, “Peran Pimpinan Dalam Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Organisasi”, Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau (2023)

undang dan peraturan yang relevan dan sering melakukan sesi pelatihan untuk meningkatkan tingkat kesadaran hukum di dunia kerja.

2. Pembentukan Unit Hukum yang Efektif

Untuk mengawasi kepatuhan terhadap peraturan, bisnis perlu memiliki departemen hukum yang solid dan mampu. Dengan cara ini, kemungkinan pelanggaran dapat ditemukan dan ditangani sebelum menjadi masalah serius.

3. Pengembangan Sistem Informasi Hukum

Untuk meningkatkan manajemen risiko, sistem informasi hukum yang ada saat ini sangat penting. Hal ini mencakup pengawasan terhadap perubahan peraturan dan pengorganisasian dokumen hukum terkait. Dengan pengetahuan yang benar, bisnis dapat beradaptasi terhadap perubahan secara efisien dan cepat.

4. Penerapan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Reputasi suatu organisasi dapat ditingkatkan dengan melaksanakan program CSR. Selain menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat, langkah ini dapat menurunkan risiko reputasi yang terkait dengan praktik perusahaan yang tidak etis.

5. Protokol Krisis dan Pemulihan Reputasi

Bisnis harus memiliki prosedur manajemen krisis yang siap untuk mengatasi kejadian tak terduga yang dapat merugikan merek mereka. Hal ini mencakup taktik pemulihan reputasi yang digunakan setelah suatu insiden, seperti jalur kontak terbuka dengan pihak terkait dan penyelesaian masalah yang cepat.

6. Monitoring dan Pelaporan Risiko Reputasi

Penting untuk terus mencermati hal-hal yang dapat merugikan reputasi perusahaan. Manajemen harus menerima laporan tentang keluhan pelanggan dan masalah media untuk mengambil tindakan pencegahan.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, perusahaan tidak hanya dapat memitigasi risiko pelanggaran hukum tetapi juga menjaga reputasinya di mata publik dan pemangku kepentingan. Perusahaan tidak hanya dapat memitigasi risiko pelanggaran hukum tetapi juga menjaga reputasinya di mata publik dan pemangku kepentingan.¹⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

Hukum memiliki peran penting dalam mencegah praktik bisnis tidak etis, serta membantu perusahaan memitigasi risiko pelanggaran hukum melalui penerapan kebijakan strategis yang tepat. Dengan regulasi yang ketat, perusahaan didorong untuk mematuhi standar etika dalam operasionalnya, termasuk melindungi hak karyawan, konsumen, dan pemangku kepentingan. Langkah-langkah strategis seperti manajemen risiko hukum, pembentukan unit hukum yang solid, dan pengembangan sistem informasi hukum yang terbaru juga berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan. Selain itu, penerapan kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan protokol

¹⁰Desy Salsa Biela & Abraham Ferry Rosando, "AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HAK ATAS MEREK", *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No. 1 (2022)

krisis yang tepat membantu menjaga reputasi perusahaan di mata publik. Dengan pengawasan ketat terhadap risiko reputasi melalui pemantauan keluhan pelanggan dan media, perusahaan tidak hanya menghindari pelanggaran hukum, tetapi juga membangun budaya bisnis yang transparan, etis, dan berkelanjutan.

Pemerintah perlu aktif dalam penerapan kebijakan hukum yang tepat dan pengelolaan risiko hukum berdampak positif tidak hanya dalam menghindari pelanggaran jangka pendek, tetapi juga dalam membangun reputasi perusahaan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing di pasar global.

Perusahaan diharapkan dapat menginternalisasi etika bisnis melalui kebijakan internal yang jelas, keterlibatan aktif manajemen puncak dalam mendukung kepatuhan hukum dan implementasi langkah-langkah mitigasi risiko, untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan efektif dan tidak hanya sekadar prosedur formalitas.

DAFTAR REFERENSI

- Alkahfi, M. A., & Nawawi, Z. M. (2022). Peran Etika Bisnis dalam Perusahaan Bisnis di Era Globalisasi. *ManBiz: Journal of Management and Business*, 1(2), 75-88.
- anudjaja, B. B. (2006). Perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia. *Jurnal Desain Komunikasi Visual Nirmana*, 8(2), 92-98.
- Arief, H. M. (2019). Business Ethic And Good Governance (Be & Gg) Etika Bisnis Pada PT Sucaco Tbk. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 1(2), 153-161.
- Desy Salsa Biela, & Abraham Ferry Rosando. (2022). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Pelanggaran Hak Atas Merek. *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1).
- Hasoloan, A. (2018). Peranan etika bisnis dalam perusahaan bisnis. *Warta Dharmawangsa*, (57).
- Mustika, A., Mindari, E., Kartawinata, B. R., Rachmawati, M., Mahriani, E. Nugraheni, K. S., & Solihat, W. (2020). *Pengantar Bisnis*.
- Rajagukguk, E. (2012). Perluasan Tafsir Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. *Jurnal Yudisial*, 5(1), 51-63.
- Ridho Kurniawan Siregar. (2023). Peran Pimpinan dalam Penerapan Mitigasi Risiko dalam Organisasi. *Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau*.
- Rustandi, & RR Amanna Dzikrillah Lazuardini LAH. (2023). Implikasi Hukum Bisnis Terhadap Praktik Etika Bisnis di Indonesia. *Jurnal Bisnis & Kewirausahaan*, 19(2), 62.
- Suryadi, N., Basuki, A., & Moko, W. (2021). *Etika Bisnis*. Universitas Brawijaya Press.